



PDAM Pancuraji Disuntik Rp11 Miliar

Harus Libatkan BPK

SANGGAU - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sanggau, Konggo Tjondro menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memberikan suntikan dana kepada PDAM Tirta Pancuraji Sanggau sebesar Rp11 miliar demi menyelamatkan PDAM dari kerugian.

Namun demikian Konggo meminta, agar dalam proses pelaksanaannya nanti-hingga selesai, Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat melibatkan atau bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping untuk menghindari adanya indikasi penyelewengan, dana yang tidak sedikit itu memang wajib diketahui oleh publik.

"Kita minta agar ada MoU dengan BPK terkait dengan prosesnya, supaya tidak menyimpan. Jadi dari awal penggunaannya bisa diawasi," katanya, Sabtu (31/8).

◆ **Ke Halaman 27 kolom 5**

PDAM Pancuraji Disuntik Rp11 Miliar

Sambungan dari halaman 17

Sebelumnya, Konggo mengaku kurang yakin dengan angka pasti kebocoran 46 persen yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau, Ir Kukul Triyatmaka.

"46 persen itu akurat tidak? Bisa lebih, bisa kurang, normatif. Alasan meteran rusak, tidak jalan. Saya tidak yakin, bisa dibawah itu, itu bisa saja alasan pembenaran membela diri," katanya.

Namun demikian Konggo tetap berprasangka baik dengan rencana kucuran dana Rp11 miliar yang tujuannya untuk menyelamatkan pelayanan PDAM yang memiliki 12 ribu orang pelanggannya itu. Selain ada MoU dengan BPK, Konggo juga meminta agar suntikan dana tersebut dibuatkan Peraturan Daerah (Perda)-nya, agar bisa disosialisasikan ke masyarakat luas.

"Ini Rp11 M, saya minta itu ada Perda-nya, apakah mau berupa barang atau

naam Pembangunan Daerah (Bappeda) Sanggau, Ir Kukul Triyatmaka, Selasa (26/8).

Dana itu rencananya diantaranya akan dibelikan mesin water meter yang berfungsi mengontrol pengeluaran air.

"Yang sangat besar (kebutuhan dana) untuk water meter, karena kebocoran PDAM saat ini 46 persen. Jadi ada orang yang bayar Rp50 ribu ngalirnya 24 jam, tapi ada juga yang tidak mengalir, sehingga kebocoran yang 46 persen itu menjadi beban PDAM. Tentu itu perlu adanya penggantian water meter. Karena juga satu sisi PDAM punya piutang yang tinggi yang sampai sekarang belum teratasi, kurang lebih 7-8 miliar," katanya.

Kukul mengatakan, pemerintah daerah cukup memahami kendala yang dialami PDAM saat ini. Dia pun menganggap wajar, jika kemarin PDAM sampai menunggak hutang listrik PLN.

"Jadi seandainya sekarang

PDAM membayar listriknya hampir Rp600 juta saja kan kesulitan. Satu sisi pendapatannya seret, lossing-nya tidak ada tindakan karena tidak ada duit, ini yang kami masih mau finalkan, kami rapatkan berkali-kali karena itu kami prioritaskan sekali, (bentuknya) bisa penanaman modal, bisa dalam bentuk hibah," jelasnya.

Kukul berharap dengan penambahan bantuan Rp11 miliar nantinya, PDAM dapat memperlancar pelayanannya kepada masyarakat, memulihkan keuangannya dan bisa menambah pemasukan bagi daerah.

"Targetnya dari Rp11 miliar itu, minimal pelayanan bisa lancar, kontinyu, kemudian keuangannya sehat, sukur-sukur bisa menambah pelangan. Jumlah pelanggan kita sekarang ada 12 ribu. Mengelola 12 ribu itu, kalau betul, paling tidak dia bisa membiayai dirinya sendiri. Pemerintah bisa membantu karena fungsi PDAM selain pelayanan juga ada fungsi sosial," katanya. (fkk)